

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan program strategis *Shrimp Estate* atau proyek tambak udang *modern* berskala besar di Kabupaten Kebumen yang memakan dana hingga mencapai Rp250 miliar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menimbulkan *pro* dan *kontra* di kalangan masyarakat (Andina Librianty, 2021). *Shrimp estate* yang dibangun di atas tanah seluas 100 hektar dengan kapasitas pembangunan yang telah selesai adalah 60 hektar dengan anggaran mencapai Rp175 miliar berhasil memangkas habis hutan konservasi *mangrove* garapan Dinas Perhutanan Kabupaten Kebumen (Fur, 2023).

Pembangunan yang direncanakan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat ini justru menghasilkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat. Dampak tersebut yaitu timbulnya konflik antara masyarakat dengan pemerintah akibat penggunaan lahan milik warga yang juga menjadi bagian dari pembangunan, ketidaksesuaian ganti rugi (jaminan), warga yang kehilangan akses terhadap sumber daya, angka pengangguran meningkat karena warga yang kehilangan pekerjaannya seperti para penderes nira kelapa, nelayan, penambak udang perseorangan sementara muncul adanya isu pekerja proyek kebanyakan merupakan tenaga asing, salah satunya adalah dari Korea Selatan sedangkan warga yang terdampak yang dijadikan pekerja proyek hanya diambil sebesar dua puluh persen [Muhrodi, Hasil Wawancara, 08 Januari 2023].

Kemudian, pembangunan yang digaungkan mengedapankan konsep perkebunan udang ramah lingkungan dalam pengolahan hasil limbah dari proyek ini tidak dijalankan sesuai dengan konsep awal di mana hasil limbah proyek *shrimp estate* dialirkan begitu saja ke laut yang berasal langsung dari kolam khusus limbah tambak, alhasil limbah yang

dihasilkan cukup besar. Sebelumnya, di tahun 2015, warga sempat mengeluhkan mengenai usaha tambak yang limbahnya langsung dibuang ke sungai, berharap *shrimp estate* akan berbeda, namun ternyata pencemaran tetap ada. Di satu sisi, jarak bibir pantai dengan proyek sangat dekat, tanpa adanya pembatas, ataupun hutan penyangga. Itu tentu berbahaya mengingat sepanjang garis pembangunan proyek merupakan zona merah wilayah laut selatan (Setiawan Muhdianto, 2023).

Melihat dari kasus pembangunan serupa yang berada di wilayah Jawa Timur yakni pengalihfungsian lahan hutan *mangrove* menjadi tambak udang membuat eksistensi hutan *mangrove* semakin memburuk yaitu dari total 9.345,37 hektar lahan konservasi hutan, hanya sekitar 22,38 persen yang berada dalam kondisi baik (Ridwanuddin, P, 2023). Penguasaan akan tanah yang dilakukan oleh perusahaan tambak udang tersebut telah membuat konflik yang berlarut-larut. Pembangunan tersebut juga membuat kerusakan ekosistem berkepanjangan serta perubahan pada kondisi kelompok pedesaan, Tuban adalah salah satu yang terdampak dari adanya proses tersebut di mana kehidupan tradisional di desa perlahan menghilang dan desa berubah menjadi kota kecil untuk pertanian (Lefevbre, 2016). Mengutip dari (Chambers, 1987), orang asing tidak merasakan kemiskinan desa, kelompok inti perkotaan yang tertarik dan terjebak mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan serta kecerdasannya sementara kelompok pinggiran di pedesaan tetap tertinggal dan dilupakan. Hal itu sesuai dengan kontrak kerja sebagai janji pengganti kerugian bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan yang dijalankan oleh proyek lebih dominan memberikan untung kepada pihak proyek sedangkan masyarakat tetap mengalami kerugian yang berarti.

Lebih lanjut, istilah *shrimp estate* memang terdengar asing dikalangan masyarakat, bahkan di kalangan pembudidaya perikanan, ini karena *shrimp estate* pertama kali dikenalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk penyebutan skema atau

model pengembangan kawasan terintegrasi yaitu Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) yang dilakukan dari hulu ke hilir (Andy Jauhari, 2021). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, *Shrimp Estate* termasuk ke dalam salah satu program strategis nasional (PSN) sejenis dengan *food estate* yang berbasis kawasan yakni Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan. Pembangunan *shrimp estate* di Kabupaten Kebumen merupakan program kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mengembangkan kawasan budidaya udang terintegrasi berskala besar dari hulu ke hilir. *Shrimp estate* sebelumnya merupakan rencana program KKP untuk Kalimantan Tengah yang tertera dalam Permen KKP Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu (*Penaeus Monodon*) dan Udang Vanname (*Litopenaeus Vannamei*), namun Kebumen dijadikan contoh terlebih dahulu sebelum *shrimp estate* di Kalimantan Tengah dibuat (Jatnika, A. & Hidayat, K., 2022). Namun, pembangunan ini rupanya juga diselubungi oleh kekuatan elit politik yaitu dari partai pendukung Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yakni Partai Gerindra (Farid, 2021). Keterlibatan ini berpengaruh terhadap perubahan peraturan di daerah serta kesepakatan kedua pihak berlanjut pada kekuasaan dua periode. Partai Gerindra memilih kembali Arif Sugiyanto sebagai calon Bupati Kebumen pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, di November mendatang (Isti, 2024).

Shrimp Estate menerapkan konsep *zero waste* (bebas sampah) dan akuakultur modern 4.0 (*good aquaculture practice*) atau penerapan industrialisasi dengan penggunaan alat-alat canggih dalam pemeliharaan perikanan yang meliputi standar kualitas seperti instalasi, kualitas air, maupun kualitas kawasan pesisir. Secara singkatnya *shrimp estate*

adalah tambak udang *modern* yang menjadi terobosan model usaha dan dikelola secara konvensional dengan mengusung sistem ekologis. *Shrimp Estate* Kebumen terdiri dari 149 tambak dengan dilengkapi berbagai infrastruktur. Meliputi saluran masuk air (*water intake*), tangki, tempat pemeliharaan, saluran IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), laboratorium, penyimpanan pakan, penyimpanan peralatan produksi, bangunan pasca panen, rumah genset, rumah staf jaga tambak, dan lini produksi. Program *Shrimp Estate* di Kebumen akan dijadikan sebagai contoh untuk pembangunan *shrimp estate* di wilayah lain seperti di Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur yang memiliki jumlah luasan sekitar 2.085 hektar (Ebron, 2023).

Pembangunan *shrimp estate* selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk meningkatkan *volume* ekspor udang yaitu untuk jenis udang *vanname* sebagai komoditi ekspor unggulan. Peningkatan *volume* ekspor tersebut sejalan dengan target peningkatan nilai ekspor udang nasional sebesar 25% dengan menargetkan jumlahnya menjadi 2 juta ton udang di tahun 2024. Hal itu sesuai dengan perkiraan penggunaan lahan seluas 100 hektar dengan 50 hektar lahan produksi, menargetkan produktivitas 80 ton/hektar/tahun atau 4000 ton per tahun. Pada tahun 2022, produksi udang *vanname* sebanyak 1.618.432-kilogram dengan nilai Rp101.956.400.000,00 (Dian, 2022). Kemudian, untuk di Kabupaten Kebumen, daerah pembangunan proyek ini berada di pesisir selatan meliputi dua kecamatan sekaligus yaitu Kecamatan Klirong dan Kecamatan Petanahan (pembangunannya dimulai dari Desa Jogosimo (Kecamatan Klirong) sampai dengan Desa Karanggadung yang berada di Kecamatan Petanahan), dengan pusatnya berada di Desa Tegaloretno (Kecamatan Petanahan).

Penelitian ini nantinya akan menggunakan teori politik lingkungan yang mana dalam teori ini dilakukan pendekatan dengan menggabungkan masalah lingkungan dan politik ekonomi guna mewakili sebuah perubahan dinamis dalam besarnya ketegangan di

antara lingkungan manusia, kelompok-kelompok di dalam masyarakat dengan skala individu lokal pada transnasional seluruhnya (Rasyid & Felixiani Keviola, 2020). Teori tersebut berhubungan erat dalam penelitian ini karena dengan adanya perizinan pembuatan proyek itu, dimana mereka mungusung tema “ekologi” dengan beralasan pada peningkatan perekonomian masyarakat, tetapi tujuan utamanya bukan untuk masyarakat melainkan untuk pihak yang terlibat dalam proyek tersebut (kaum kapital). Kemudian, pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi politik, yaitu pendekatan yang berkaitan dengan interaksi antara proses politik dan ekonomi masyarakat dalam hal distribusi kekayaan di antara individu dan kelompok yang berbeda, dan proses yang menciptakan, memelihara, dan mengubah hubungan itu secara berkelanjutan. Selain itu, objek studi dalam ekonomi politik adalah bagaimana proses produksi dan redistribusi diatur sesuai dengan hukum yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh negara. Di sisi lain, pokok bahasan ekonomi politik tidak hanya bagaimana meningkatkan kekayaan, tetapi juga bagaimana mengatur produksi, distribusi, dan penggunaan kekayaan (Kurniawan, Budi, 2021).

Hal ini bisa kita lihat dari penetapan pembangunan *shrimp estate* terjadi setelah penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan *shrimp estate* yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu Dr. Tb Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc dengan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, S.H., M.H yang disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Ir. Sakti Waahyu Trenggono, M.M, di Jakarta pada 12 Agustus 2021. Kemudian, rencana pembangunan *shrimp estate* dimulai pada bulan April 2022, namun aksi pembersihan lahan (*land clearing*) sudah dimulai sejak akhir September 2021, lalu peletakan batu pertama (*groundbreaking*) dilakukan pada Desember 2021 (Fika N.U & Erlangga, D., 2021). Sementara itu, peraturan terkait lokasi pembangunan ini baru akan disiapkan pada

November 2021 seperti pada ketetapan hukum Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 101 Tahun 2021 tentang Lokasi Pengembangan Budidaya Udang Berbasis Kawasan (Jatnika, A. & Hidayat, K., 2022). Di sisi lain, sosialisasi secara menyeluruh terhadap pembangunan ini nyatanya juga belum dilakukan dan belum ada persiapan sama sekali. Sebenarnya, pembangunan proyek ini terkesan terburu-buru dengan memaksakan kapasitas lahan yang tidak seharusnya yang mana proyek ini memakan keseluruhan hutan konservatif yang awalnya merupakan bagian pengelolaan dari Dinas Kehutanan Cabang VIII Kebumen. Sebelumnya pengelolaan yang dilakukan Dinas Kehutanan ini meliputi hutan *mangrove* dan hutan pantai (Rohana, 2022).

Untuk pengelolaan kegiatan hutan konservatif di Desa Tegalretno terdiri atas hutan pantai yaitu tanamannya berupa cemara laut dengan luas lahan sekitar 10 hektar, serta hutan *mangrove* dengan luas lahan 4 hektar. Sedangkan untuk Desa Karanggadung penggunaan lahan sebagai hutan konservatif (hutan pantai) ada sekitar 20 hektar dan sebagian besar tanamannya berupa cemara dan sisa lahan berikutnya berada di Kecamatan Klirong. Maka, dengan adanya pembangunan *shrimp estate* ini hutan konservatif yang berada di wilayah Jogosimo (Kecamatan Klirong) sampai dengan Karanggadung (Kecamatan Petanahan) terbabat habis. Ini tentu sangat miris mengingat tanaman pantai sangat penting untuk mencegah abrasi dimana akar-akar dan batang tanaman tersebut digunakan untuk menopang air yang datang (Indah, K.T., 2021). Selain itu, yang lebih mirisnya lagi adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah berkali-kali menyosialisasikan terkait dengan gelombang tsunami yang dapat saja terjadi mengingat kondisi ombak laut yang berada di Desa Tegalretno dan sekitarnya, diperkirakan ketinggian air bisa mencapai angka 12 meter dan tidak tanggung-tanggung jika hal ini terjadi, proyek tersebut tentu saja bisa tenggelam karena di pesisir pantai tersebut tidak ada satu pun pohon yang menopang, bahkan muara sungai dengan laut hampir menyatu jika tidak ada pasir

sebagai pemisah. Perkiraan tinggi air laut ini sendiri juga bukan semata-mata baru dilakukan tetapi juga melalui proses pemantauan, kita bisa lihat sendiri pada tahun 2020 di Kebumen, ketinggian air laut sudah mencapai sekitar 4-6 meter (Anggraeni, 2022), dan berita terbaru di tahun 2022 wilayah pesisir di Desa Karnggadung habis ditelan oleh lautan air, hutan konservatif yang dulu ada sudah tergantikan dengan air.

Lalu, seperti yang diungkapkan sebelumnya jika pembangunan proyek ini pada awalnya tidak ada sosialisasi terkait yang dilakukan dari pihak KKP dengan Dinas Kehutanan, hal ini karena pembuatan awalnya adalah permintaan 50% lahan konservatif untuk dijadikan usaha tambak udang oleh Kepala KKP, hingga dari pihak KKP meminta penambahan lagi yang semula 50:50 menjadi 80:20 (80 hektar untuk pembangunan *shrimp estate* dan 20 hektar untuk hutan konservasi atau hutan *mangrove*) dengan pertemuan pribadi dengan Kepala Dinas Kehutanan yang beralasan lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan proyek *shrimp estate* dan didukung oleh Bupati Kebumen. Di sisi lain, pertemuan tersebut bertepatan dengan kunjungan penyuluh kehutanan untuk melihat hasil garapan lahan atau hutan konservatif yang sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Alhasil dari sini terjadi ketidaksinkronan antara atasan dengan bawahan, selain itu, pada awalnya masyarakat juga banyak yang memprotes lahan tersebut digunakan untuk proyek *shrimp estate* karena jika dilihat dari sisi positif dan negatifnya, sisi negatif lebih banyak dibandingkan dengan positif, yang mana masyarakat sekitar tidak bisa lagi memancing ikan maupun menyadap nira kelapa untuk dijadikan gula jawa. Hampir sebagian besar warga sekitar kehilangan mata pencahariannya akibat pembangunan proyek tersebut.

Selain itu, janji pihak KKP dan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan, kenyataannya pergantiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini juga didukung dengan protes yang dilakukan salah satu warga Desa Tegalretno yaitu Daryono (63 tahun),

beliau melakukan somasi kepada Kepala Desa Tegalretno dan Bupati Kebumen yaitu H. Arif Sugiyanto, S.H terkait dengan Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Pesisir Selatan Desa Tegalretno Kebumen. Surat panggilan tersebut berada pada kuasa hukum Yuli Ikhtiarto S.H dan sudah ditandatangani sejak tanggal 15 Juni 2022 yang lalu. Tujuan pemberian somasi ke Bupati Kebumen ini adalah untuk penghentian penggunaan bahan-bahan yang merusak fasilitas demi kelangsungan pengelolaan tambak udang yaitu seperti listrik, saluran air dari air laut, dan jalan lokasi (jalan lokasi hancur total, hampir tidak bisa dilewati sama sekali), serta mengganti lahan kosong serupa di lokasi terdekat yang tidak terkena proyek yang siap digunakan untuk pengelolaan tambak udang (maksudnya yaitu meliputi fasilitas penunjang beserta kerugian *materiil* dan *immaterial* apabila poin 1 dan poin 2 tidak terpenuhi) (Mama, 2023).

Sedangkan untuk somasi yang diberikan dari Sartimin dan Rusmin adalah untuk Kepala Desa Tegalretno. Tujuan dari pemberian somasi untuk kepala desa (kades) diharapkan agar kades tersebut dapat menghentikan sementara kegiatan yang melintas di tanah para pemberi hibah (hal ini dilakukan karena Sartimin dan Rusman telah mengolah tanah selama beberapa dekade) setidaknya sampai penggantian Hak Lahan Bebas (HKB) terkait direalisasikan di tanah garapan pemberi hibah. Selain itu, penggantian pembangunan rumah dan kandang ternak akibat pembongkaran proyek. Penggantian *immateriil* atas apa yang telah dilakukan oleh pemberi hibah. Adapun konflik lain yang terjadi di kawasan TNI yang berada di Desa Setrojenar serta wilayah ujung selatan yang berada di Desa Tegalretno. Perangkat Desa menolak adanya pembangunan proyek dan melakukan demo hingga Kepala Kepolisian Sektor Desa Setrojenar turun tangan langsung untuk menengahi. Penyebabnya adalah wilayah tersebut merupakan area konservasi hutan cemara yang telah ditanam sejak tahun 2016 serta sudah ditentukan batas-batas area tersebut. Di satu sisi, di Desa Tegalretno terdapat kelompok perhutanan yang mengembangkan area konservasi itu

untuk terus ditanami sementara pihak proyek menginginkan area tersebut untuk dialihkan menjadi area yang masuk dalam pengembangan proyek *shrimp estate* (Solehudin, 2023). Selain itu, dampak lain dari adanya proyek ini adalah sebagian warga mengalami gagal panen jagung akibat banjir yang datang dari pesisir dan melahap tanaman jagung mereka (Kuncoro, 2022).

Pembangunan *shrimp estate* selain membawa ancaman bencana yang besar akibat vegetasi penahan ombak atau tsunami seperti hutan *mangrove*, hutan pinus, dan lainnya hilang; efek lainnya adalah marginalisasi masyarakat yang berpengaruh terhadap beberapa sumber ekonomi warga yang menghilang seperti para penderes nira kelapa, petani tambak mandiri, serta nelayan; serta masalah lingkungan lainnya yang diakibatkan dari limbah *shrimp estate*. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini akan membahas lebih lanjut bagaimana politik lingkungan dalam pembangunan program strategis nasional *shrimp estate* di Kabupaten Kebumen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada apa yang dijelaskan di dalam latar belakang, maka rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana politik lingkungan dalam pembangunan program strategis nasional *shrimp estate* di Kabupaten Kebumen?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yakni:

Untuk mengetahui bagaimana pembangunan *shrimp estate* di Kabupaten Kebumen ini memberikan pengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat serta mengkaji mengenai politik lingkungan dalam pembangunan program strategis nasional *shrimp estate* di Kabupaten Kebumen.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada dua yaitu manfaat praktis serta manfaat teoritis. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut.

1) Manfaat Praktis

Manfaat teoritis lebih mengedepankan terkait dengan pemecahan masalah yang akan diteliti. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Hasil akhir penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai politik lingkungan dalam pembangunan program strategis nasional *shrimp estate* di Kabupaten Kebumen.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pembaca mengenai politik lingkungan dalam pembangunan program strategis nasional *shrimp estate* di Kabupaten Kebumen memberi dampak pada kondisi lingkungan dan sosial masyarakat dan diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang serupa.

2) Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian teoritis didasarkan pada berbagai tujuan penelitian untuk menguji teori-teori yang ada. Memperkuat atau menyangkal teori. Manfaat teoritis muncul dari fakta bahwa peneliti tidak puas atau meragukan teori tertentu. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, terkhusus untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya tentang dampak politik lingkungan pada kerusakan ekosistem bakau (*mangrove*) dan pada kondisi sosial masyarakat akibat pembangunan tambak atau proyek pemerintah.

1.4 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sama membahas mengenai politik lingkungan melalui pembangunan kawasan pesisir dan akibat buruk alih fungsi hutan *mangrove* menjadi tambak udang tetapi demikian mempunyai tema, tujuan, maupun indikator yang berbeda-beda, antara lain;

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Topik Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian dan Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Rofiqi, I. (2017) Pentingnya Etika Lingkungan dalam Melestarikan Sumber Daya Alam	Mengkaji seberapa pentingnya etika lingkungan dalam melestarikan sumber daya alam yang mencakup hubungan-hubungan etika lingkungan serta bagaimana perilaku manusia terhadap lingkungannya.	Etika lingkungan atau etika ekologi menjadi sebuah pedoman bagi manusia untuk menjaga, menyayangi, dan melestarikan alam. Etika lingkungan diperlukan supaya setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan harus dipertimbangkan secara cermat sehingga menciptakan keseimbangan antara manusia dan alam.	Etika lingkungan diperlukan saat pembangunan proyek shrimp estate untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, serta sekelilingnya.	Etika lingkungan yang tidak seimbang mengancam masa depan kawasan di sekitar proyek shrimp estate dan di sepanjang pesisir selatan serta sekitarnya yang dijelaskan lebih lanjut melalui kasus di wilayah yang terdampak proyek shrimp estate.
2.	Suryani, A. S. (2019) Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Peran	Menghitung seberapa besar pengaruh kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran	Pembahasan mengenai pentingnya keseimbangan antara kebijakan pemerintah dengan peran	Pada penelitian tersebut melalui kebijakan pemerintah dalam menjaga kualitas

	Serta Masyarakat terhadap Kualitas Lingkungan Pesisir Benoa Badung Bali.	kualitas lingkungan pesisir di Kawasan Benoa Badung Bali.	indeks untuk kebijakan pemerintah di Kawasan Benoa adalah 67,45 (cukup), indeks peran serta masyarakat 78,06 (baik), indeks kondisi perairan 72,78 (baik) dan indeks kondisi daratan 74,62 (baik). Analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap kualitas lingkungan pesisir dan pantai ($r=0,541$). Kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat berpengaruh positif terhadap kondisi kualitas lingkungan pesisir dan pantai.	serta masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan pesisir.	lingkungan pesisir adalah dibantu dengan adanya pembangunan IPLT dan IPAL sementara dalam proyek shrimp estate kebijakan akan pembangunan tersebut belum dilakukan.
3.	Suryati Nengsih, N. (2020). Penerapan Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Daerah	Mengetahui bagaimana cara pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan indikator pembangunan	Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa pembangunan wilayah pesisir ditinjau dari segi lingkungan hidup pengadaan harus	Konsep pengelolaan kawasan pesisir dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat yang	Pada penelitian milik Suryati Nengsih, N. (2020), capaian pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan

	Pesisir dalam Keanekaragaman Hayati laut Untuk Mensejahterakan Masyarakat.	berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya dengan tetap berfokus menjaga pentingnya keseimbangan di daerah pesisir termasuk dalam menjaga keanekaragaman hayati laut.	memperhatikan ketertataan konservasi lahan dan pengendalian ekosistem wilayah, akan tetapi pengelolaan daerah pesisir belum memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber daya yang baik sehingga berpengaruh pada kondisi daerah pesisir secara tidak langsung.	dilakukan dengan melihat kerja sama antara masyarakat, ilmuan, dan pemerintah.	basis wisata di kawasan pesisir dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini pembangunan shrimp estate dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai ekspor udang disamping mensejahterakan masyarakat di mana cakupan wilayahnya lebih besar.
4.	Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Kapitalisme, Kisis Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia.	Menganalisis mengenai masalah lingkungan hidup di Indonesia yang merupakan bagian dari krisis global dan pengaruhnya terhadap isu keadilan intergenerasi.	Proses industrialisasi dan kapitalisasi membuat manusia memiliki pola pikir antroposentris terhadap rasionalitas modern sehingga dapat mengakibatkan adanya krisis ekologis dan menimbulkan dominasi manusia atas manusia serta manusia dengan alam. Namun, hal ini dapat dihapus dengan dilakukannya reformasi pendidikan dan kelembagaan.	Pada penelitian tersebut kajian mengenai dominasi atas manusia serta dominasi manusia dengan alam memiliki kesamaan dengan napa yang dikaji dalam penelitian proyek shrimp estate. Masyarakat yang lemah dan tidak memiliki kekuasaan akan selalu terdorong ke bawah sementara alam semakin dikuasai untuk kepentingan perekonomian mengesampingkan aspek ekologis yang lebih mendalam.	Pembahasan mengenai prinsip dasar yang berfungsi sebagai kerangka dasar pengelolaan lingkungan dan sumber daya akan dikaji lebih lanjut mengenai kesesuaian prinsip tersebut dengan pembangunan proyek shrimp estate sementara di penelitian milik Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020), prinsip-prinsip tersebut hanya dijelaskan secara garis besarnya saja

5.	<p>Pratiwi, A., Sri Harini, I., & Pristine Adi, D. (2020).</p> <p>Analisis Transnasionalisme dalam Kapitalisme Global: Studi Kasus Penolakan Reklamasi Teluk Benoa Nusa Bali</p>	<p>Mengkaji adanya penolakan yang timbul di masyarakat atas penguasaan kapitalis global terhadap pariwisata dan budaya Bali melalui proyek reklamasi Teluk Benoa dengan analisis transnasionalisme.</p>	<p>Alasan masyarakat menolak adanya reklamasi karena proyek tersebut kontra dengan adat, budaya, dan agama ditambah dengan ketimpangan <i>procedural</i> dan politik terkait izin pembangunan. Selain itu, tidak adanya kebijakan yang jelas tentang proyek tersebut yang tidak berdampak negatif dengan adat dan kebudayaan Bali.</p>	<p>Penelitian milik Pratiwi, A., Sri Harini, I., & Pristine Adi, D. (2020). memiliki kesamaan dengan studi yang akan dikaji yang pertama adalah lokasi proyek merupakan kawasan konservasi, kedua yaitu adanya ketimpangan <i>procedural</i> dan politik terkait izin pembangunan <i>shrimp estate</i> yang belum jelas. Hal ini terutama merujuk pada peraturan terkait perizinan yang dibuat setelah pembangunan proyek <i>shrimp estate</i> dilakukan.</p>	<p>Penelitian tersebut lebih menonjolkan bagaimana pembangunan proyek reklamasi bertentangan dengan adat dan istiadat Bali, sementara pada penelitian ini bukan hanya mengenai aspek adat-istiadat melainkan bagaimana kondisi sosio-ekologis masyarakat dengan adanya pembangunan proyek <i>shrimp estate</i>, khususnya di kawasan pesisir Kabupaten Kebumen</p>
6.	<p>Waif, A., Astiani, D., & Roslinda, E. (2021).</p> <p>Peran Mangrove dalam Memitigasi Ancaman Degradasi Ekosistemnya di Polaria Tanjung Pagar Kabupaten Mempawah (The Role of Mangrove in Mitigating The Threats Of Its Ecosystem Degradation At Polaria Tanjung</p>	<p>Meningkatkan wawasan serta kepedulian masyarakat tentang pentingnya peran mangrove untuk mencegah ancaman degradasi dan kerusakan ekosistem yang ada.</p>	<p>Kerapatan pohon mangrove yang tinggi dapat mengurangi ancaman degradasi. Pemeliharaan serta pengelolaan yang baik dapat terus meningkatkan kepositifan manfaat yang ada serta Hutan Mangrove Polaria Tanjung Pagar terbukti memiliki fungsi yang baik.</p>	<p>Peningkatan kepedulian masyarakat akan manfaat hutan mangrove cukup tinggi sebelum adanya pembangunan proyek <i>shrimp estate</i>. Begitu pun mengenai pemanfaatan hutan mangrove untuk mencegah ancaman degradasi, jarak bibir pantai dengan hutan yang terbilang cukup jauh serta tingkat kerapatan yang</p>	<p>Pada penelitian ini pemanfaatan hutan mangrove diabaikan untuk kepentingan proyek pembangunan yakni <i>shrimp estate</i>. Kawasan konservasi hutan mangrove digunduli berbanding terbalik dengan hutan mangrove yang berada di Polaria Tanjung Pagar. Tingkat</p>

	Pagar Mempawah Regency)			cukup baik untuk menahan terjangan ombak.	kerapatan menjadi tidak sempurna akibat hutan mangrove yang dipangkas akibat pembangunan proyek shrimp estate.
7.	Raditya, A., & Haji Noh, M. (2022) Krisis Ekologi Berganda di Situs Mata Air, Malang.	Analisis lebih lanjut mengenai sebab terjadinya krisis ekologi berganda yang timbul di Situs Mata Air, Malang.	Studi menyebutkan bahwa penyebab timbulnya krisis ekologi berganda adalah karena adanya konsep pembangunan yang kurang memperhatikan aspek-aspek ekologis, sehingga pembangunan menjadi cacat. Belum lagi dengan orientasi pembangunan yang hanya bertujuan untuk meningkatkan profit dan kuantitatif sebanyak mungkin. Dari sini konsep pembangunan ekowisata justru berubah menjadi krisis yang berlanjut.	Konsep ekologi berganda ini mirip dengan konsep ekologi dalam pembangunan proyek shrimp estate. Pembangunan shrimp estate lebih mengedepankan profit atau pendirian bangunan terlebih dahulu sementara cakupan ekologisnya masih kurang yaitu mengenai pengelolaan limbah hasil proyek yang masih minim dengan hanya bermodalkan penampungan limbah tanpa adanya filterisasi yang seimbang sementara hasil limbah akhir langsung dibuang ke laut.	Penelitian ini lebih berfokus pada kajian ekowisata sementara pembangunan shrimp estate merupakan eko-proyek atau proyek strategis milik pemerintah yang bekerja sama dengan swasta.
8.	Tampubolon, Y. H., Purba, D. F., & Teologi, P. S. (2022).	Studi ini ingin membuktikan dan mengkritik tentang etika lingkungan yang dianggap sebagai aktor	Etika lingkungan yang buruk hanya sebagian penyebab dari adanya kerusakan lingkungan, namun corak produksi	Kapitalisme ini erat kaitannya dengan dominasi atas kaum atas terhadap kaum menengah yang juga akan dibahas	Penjelasan mengenai faktor kerusakan lingkungan bukan hanya dijelaskan secara garis besar, namun dikaji

	<p>Kapitalisme Global sebagai Akar Kerusakan Lingkungan: Kritik terhadap Etika Lingkungan <i>Global Capitalism as a Root of Environmental Crisis: Criticism of Environmental Ethics.</i></p>	<p>utama kerusakan lingkungan, akan tetapi kapitalisme global yang membuat moralisme dan menyebabkan kerusakan lingkungan.</p>	<p>dan cara konsumsi kapitalisme merupakan faktor utama dari kerusakan lingkungan yang menyebabkan moralisme. Untuk menyelesaikan kerusakan lingkungan yang ada, perlu melihat bagaimana cara kerja dari sistem ekonomi dan politik.</p>	<p>dan terjadi sebelum, selama, dan sesudah pembangunan shrimp estate.</p>	<p>lebih lanjut melalui sebuah kasus dan membahas baik dari aspek kerusakan lingkungan atau ekologi juga dari aspek sosio-masyarakatnya.</p>
9.	<p>Munasikhah, S., & Agus Wijayati, P. (2022).</p> <p>Dari Hutan Mangrove Menjadi Tambak: Krisis Ekologis Di Kawasan Sayung</p>	<p>Mengkaji tentang akibat perubahan hutan mangrove yang dialihfungsikan menjadi tambak dan menyebabkan krisis ekologis di kawasan Sayung.</p>	<p>Pemanfaatan secara berlebihan di pesisir Sayung yang mengkonversikan hutan mangrove menjadi sebuah tambak dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat mengakibatkan krisis ekologi yang cukup serius yaitu abrasi. Ditambah dengan ketiadaannya penghalang, abrasi ini meluas dan menyebabkan banjir <i>rob</i> dan menggenangi beberapa wilayah.</p>	<p>Kesamaan pada penelitian ini adalah mengkonversikan kawasan konservasi hutan mangrove menjadi sebuah tambak. Akibat dari proyek tambak udang tersebut mengakibatkan banjir rob di beberapa wilayah jalur proyek salah satunya adalah Desa Tanggulangin, Kebumen.</p>	<p>Peralihan hutan mangrove menjadi tambak di pesisir Sayung murni karena campur tangan masyarakat yang mulai meningkat sejak 1980-an, sementara proyek shrimp estate merupakan proyek strategis milik pemerintah yang digagas oleh KKP. Pembangunan proyek shrimp estate merupakan pembangunan tambak udang berskala besar pertama di Indonesia.</p>

10.	Wibowo, A. F. N. (2023). Analisis Pengaruh Ekspor, Jumlah Penduduk, dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.	Mengetahui pengaruh dari nilai ekspor, populasi, dan investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 1990-2019.	Nilai ekspor dan investasi asing berpengaruh signifikan dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi sementara populasi tidak memiliki pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi.	Pembangunan proyek shrimp estate bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor udang di Indonesia serta peningkatan investasi asing melalui pengembangan proyek lanjutan di daerah lain dengan tujuan untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan masyarakat sekitar.	Pembahasan mengenai kebermanfaatan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini bukan hanya ditujukan untuk nasional tetapi akan diutamakan terlebih dahulu bagi masyarakat sekitar proyek pembangunan shrimp estate disertai perbandingan dengan cakupan pertumbuhan ekonomi skala nasional.
-----	--	--	---	--	---

Berbagai penelitian dari peneliti terdahulu di atas yang telah direview oleh penulis memiliki persamaan serta perbedaan dengan topik penelitian yang dikaji oleh penulis. Dari hasil temuan jurnal di atas, kajian yang dilakukan adalah pendayagunaan teori politik lingkungan mengenai pemberdayaan lingkungan yang berada dalam kontrol sebuah organisasi pemerintah dan merupakan hal yang mutlak pembagian kekuasaannya dilakukan oleh pemimpin pusat maupun daerah, hal ini memiliki persamaan dengan kajian penulis terkait konsep lingkungan yang digunakan sebagai alat peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, adapun pembeda mengenai proses kajian penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini, penulis memasukkan isu pemberdayaan lingkungan tersebut ke dalam konteks politik serta sosial di mana terdapat kontestasi politik serta perubahan terhadap peraturan daerah yang menimbulkan kontroversi yang bukan hanya diikuti oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) melainkan juga keterlibatan dengan partai politik serta pemimpin daerah selaku pembuat kebijakan dan memiliki pengaruh terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Politik Lingkungan

Politik lingkungan adalah studi tentang interaksi antara berbagai tingkat elemen sistem dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan publik untuk memecahkan masalah lingkungan. Secara keseluruhan, ini membahas berbagai topik krisis lingkungan hidup, ideologi politik lingkungan hidup, gerakan lingkungan hidup, partai politik, sistem politik dan ekologi, serta proses politik lingkungan hidup. Istilah “politik lingkungan hidup” didefinisikan sebagai bidang studi ilmu politik yang membahas isu-isu lingkungan terkini (Bryant & Bailey, 1997).

Kemudian, Cockburn dan Ridgeway (1979) mendefinisikan politik lingkungan sebagai tujuan tersembunyi yang dilakukan oleh negara-negara maju untuk memungkinkan eksploitasi lingkungan, yang mengarah pada adanya kombinasi faktor sosiopolitik, ekonomi dan ekologi. Hal ini memunculkan pemahaman tentang ekologi politik, yang mencakup studi tentang sebab, kondisi, dan akibat politik dari perubahan lingkungan. Ini menggambarkan keterkaitan dan hubungan yang ada antara masyarakat dan lingkungannya, yang dijelaskan oleh akses dan penguasaan sumber daya alam dan mempengaruhi keberadaan masyarakat di masa depan, selain itu, terdapat keterkaitan erat antara ilmu ekologi dan ekonomi politik (Hempel, 1996).

Menurut Verdinand Robertua Siahaan (2020) menjelaskan bahwa politik yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang tepat didalamnya, pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat untuk menangani masalah lingkungan dan politik lingkungan dengan menawarkan bermacam opsi dan alternatif yang bisa diambil dalam menangani pengelolaan sumber daya alam dan

dalam mengembangkan kajian politik lingkungan ini, kajian politik ekologi sangat relevan untuk diadaptasi dan diadopsi ke dalam politik lingkungan.

Sementara itu, Robbins (2004) mendefinisikan politik lingkungan sebagai konsep keilmuan interdisipliner yang mempelajari hubungan antara politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Inti dari politik lingkungan merupakan relasi antara politik, ekonomi, faktor sosial dengan isu dan perubahan lingkungan. Lalu, mengidentifikasi kajian politik lingkungan ke dalam empat indikator konseptual sebagai berikut.

1) Degradasi Lingkungan dan Marginalisasi Masyarakat

a) Degradasi lingkungan

Degradasi lingkungan merupakan kondisi rusaknya lingkungan hidup melalui hilangnya sumber daya alam seperti air, udara dan tanah, yang juga berujung pada penurunan terhadap produktivitas serta musnahnya tumbuhan dan hewan atau ekosistem rusak yang diakibatkan dari pencemaran dan pengambilan sumber daya alam secara berlebihan oleh tangan manusia (Danhas, B. Y., 2024).

b) Marginalisasi Masyarakat

Marginalisasi masyarakat adalah proses peminggiran yakni mengabaikan hak-hak seharusnya yang didapatkan pihak termarginalkan, namun hak-hak tersebut dilanggar dan diabaikan karena berbagai alasan dan tujuan tertentu (Murniati, 2004). Peminggiran ini juga dapat berupa peminggiran akan akses serta pengabaian terhadap mata pencaharian masyarakat (Robbins, 2004). Marginalisasi juga bisa diartikan sebagai proses pemiskinan (Fakih, 2008).

2) Konflik lingkungan

Konflik lingkungan didefinisikan sebagai suatu keadaan ketidaksepakatan antara nilai-nilai atau tujuan (yang didalamnya membahas mengenai lingkungan) yang ingin dicapai dalam diri seseorang dan dalam hubungannya dengan orang lain (Robbins, 2004). Konflik lingkungan dapat berupa perebutan pengelolaan sumber daya, tata guna lahan, yang kemudian memperparah konflik antar kelompok (*gender*, kelas, ras) karena kelangkaan sumber daya akibat pemanfaatan yang berlebihan oleh negara, perusahaan swasta, dan elit sosial (Siahaan, 2020).

3) Konservasi Hutan Bakau dan Kontrol Pemerintah

a) Konservasi Hutan Bakau

Kata ‘konservasi’ berasal dari kata ‘*conservation*’ pemaknaan dari kata *con-(together)* dan *servare (keep/save)*, mempunyai definisi tentang usaha memelihara apa yang kita miliki (*keep/save what you have*) dengan bijaksana (*wise use*) (Rizkiana, 2022). Maka dari itu, konservasi diartikan sebagai upaya mengelola sumber daya alam untuk memastikan penggunaan yang bijaksana dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, juga menjaga dan meningkatkan kualitas, nilai, dan keragaman; hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Darmayani et al., 2022). Sementara hutan bakau atau hutan *mangrove* merupakan vegetasi yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis dan subtropis yang didominasi tanaman bunga terrestrial umumnya berhabitus pohon dan semak, dan menginvasi dan tumbuh di kawasan pasang surut dengan tanah bersalinitas tinggi dan anaerob. Sehingga konservasi hutan bakau adalah kegiatan mengelola yang dilakukan dengan tujuan

perlindungan terhadap hutan bakau. Politisasi konservasi hutan *mangrove* dapat membuat penyempitan area dan peningkatan lahan kritis, yaitu lahan kering atau rusak yang diakibatkan oleh perusakan terhadap lahan tersebut. Hal, ini dapat membahayakan kelangsungan hidup ekosistem perairan bakau dan lingkungan masyarakat (Robbins, 2004).

b) Kontrol Pemerintah

Kontrol pemerintah adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui pengaturan akan variabel tertentu yang bertujuan untuk mengendalikan kondisi sesuai yang diinginkannya (Abdul, A., 2017). Dalam kontrol pemerintah terdapat keterlibatan elit politik atau elit partai politik yang dapat memengaruhi arah kebijakan, termasuk ke dalam bentuk kebijakan mendiskriminasi sekalipun. Ini menunjuk pada seseorang atau kelompok yang memiliki keunggulan dalam peran untuk memberikan pengaruh pada cabang kehidupan tertentu seperti kehidupan lingkungan dan sosial masyarakat (Haryanto, 2008). Kontrol pemerintah dapat menguat dengan melakukan cara-cara tertentu meskipun harus dengan melegalkan bentuk ketidakseimbangan dalam birokrasi (Robbins, 2004).

4) Identitas lingkungan dan Gerakan Sosial Masyarakat

a) Identitas Lingkungan

Identitas lingkungan merupakan bagian dari cara seseorang membangun konsep dirinya: perasaan diasosiasikan dengan bagian lingkungan alam yang bukan manusia, berdasarkan sejarah, hubungan emosional dan/atau kesamaan yang memengaruhi cara kita memandang dan bertindak; atau lebih seperti keyakinan bahwa lingkungan penting bagi kita

dan merupakan bagian penting dari diri kita (Siahaan, 2020). Identitas lingkungan sifatnya bersusun yang memiliki komponen individu, seperti: kesadaran lingkungan, atau keinginan untuk terhubung dengan alam; dan komponen sosial, seperti: keanggotaan kelompok atau representasi sosial (Robbins, 2004).

b) Gerakan Sosial Masyarakat

Gerakan sosial masyarakat adalah gerakan yang diprakarsai oleh masyarakat dan didorong atas tujuan bersama untuk merubah atau mempertahankan sesuatu yang telah ada (dijaga) di dalam masyarakat. Gerakan sosial ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat baik dalam menjaga alam atau lingkungan sosialnya sendiri, meningkatkan solidaritas di antara kelompok, serta perubahan terhadap pola berfikir masyarakat yang lebih maju (Robbins, 2004). Ciri gerakan sosial ada tiga yaitu memiliki tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, terorganisir, serta mempunyai ideologi (Cohen,1983).

1.6 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan pemaknaan dari sebuah konsep yang digunakan, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan.

Adapun definisi konseptual di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Politik Lingkungan

Politik Lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi dimana pengelolaan sumber daya alam berada pada akses atau kontrol pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari tuntutan permintaan pasar (ekonomi) dengan menciptakan desain kebijakan baru yang

nantinya kegiatan yang dihasilkan tersebut dapat memberikan dampak terhadap kesehatan lingkungan dan keberlanjutannya. Di dalam politik lingkungan seringkali membahas mengenai persoalan-persoalan rasial yang berkaitan dengan lingkungan, penguasaan sumber daya alam dan perusakan lingkungan, tata kelola lingkungan, tata kelola dan alat kontrol kekuasaan atas lingkungan, politik dan kebijakan.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam antara peneliti dengan orang yang membaca penelitiannya. Kegunaannya adalah untuk mempermudah pengukuran variabel.

Tabel 2. Indikator Teori Konseptual Politik Lingkungan Paul Robbins

Konsep	Variabel	Indikator
Politik Lingkungan	Degradasi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya daerah resapan air 2. Pencemaran tanah 3. Hilangnya air bersih 4. Penurunan produktivitas lahan 5. Rusaknya ekosistem flora dan fauna
	Marginalisasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peminggiran hak-hak masyarakat 2. Peminggiran atas akses sumber daya 3. Peminggiran dan pengabaian mata pencaharian masyarakat
	Konflik Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik tata guna lahan 2. Konflik elit 3. Perebutan pengelolaan sumber daya
	Konservasi Hutan Bakau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempitan lahan konservasi <i>mangrove</i> 2. Meningkatnya lahan kritis
	Kontrol Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dominasi kekuasaan pemerintah

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Perubahan dan penetapan peraturan yang mendiskriminasi 3. Keterlibatan elit politik dalam arah kebijakan
	Identitas Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemauan untuk terhubung dengan alam 2. Representasi sosial
	Gerakan Sosial Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga alam 2. Meningkatnya solidaritas antar kelompok 3. Perubahan pada pola berfikir masyarakat

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana politik lingkungan dalam pembangunan program strategis nasional *shrimp estate* yang dibangun untuk pertama kalinya di Kabupaten Kebumen yang mana memberikan pengaruh bukan hanya terhadap lingkungan namun juga pada kondisi sosial masyarakat. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017). Adapun menurut Creswell (2014), studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki

secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan prosedur pengumpulan data.

Kemudian, penelitian ini dalam mengumpulkan datanya menggunakan metode *purpose sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kasus khas yang sudah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini difokuskan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Dinas Kehutanan Cabang Wilayah VIII Kebumen, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kebumen, dan desa terdampak proyek *shrimp estate* yang melewati dua kecamatan yakni Kecamatan-Klirong-Kecamatan Petanahan (meliputi paguyuban nelayan dan masyarakat baik yang tergabung dalam kelompok tani maupun tidak) dengan pusatnya berada di Desa Tegalretno.

1.8.3 Unit Analisa Data

Unit analisa data merupakan satuan yang diteliti yang terkait dengan objek, individu dan kelompok sebagai subjek yang penelitian. Unit analisis dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Di dalam penelitian, menentukan unit analisis itu penting. Berikut unit analisa dalam penelitian ini (Hamidi, 2005).

Tabel 3. Unit Analisa Data

No	Lokasi	Jumlah	Narasumber
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen	1	Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen
2.	Kantor Bupati Kebumen	1	Bupati Kebumen atau jajarannya
3.	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	2	Ditjen Perikanan Budidaya-KKP RI atau kepala DLH KKP Kebumen atau jajarannya

4.	Dinas Kehutanan Cabang Wilayah VIII Kebumen	2	Kepala dan penyuluh KCD Kehutanan Wilayah VIII Kebumen
5.	Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kebumen	1	Kepala KLH Kebumen
6.	Kecamatan Petanahan, Kecamatan Klirong, Desa Tegalretno, Desa Tanggulangin, Desa Karanggadung	8	Pemerintah di Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Klirong, Tokoh Masyarakat dan warga yang terdampak pembangunan <i>shrimp estate</i>
7.	WALHI Jawa Tengah	1	Ketua atau jajarannya
Total		16 (enam belas) narasumber	

1.8.4 Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Data primer biasanya didapatkan dari hasil wawancara seperti dengan *stakeholder* di desa maupun penyuluh yang menangani wilayah Desa Tegalretno dan lainnya.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung atau lebih tepatnya data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lainnya (Umar, 2013). Data sekunder ini bentuknya bisa berupa arsip daerah, jurnal ilmu pemerintahan maupun politik.

Tabel 4. Daftar Sumber Data

No	Data	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Perencanaan terkait pembangunan di area yang terpengaruh dampak program <i>shrimp estate</i>	Primer	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen	Wawancara
2.	Konsep dan tujuan mengenai	Primer	Bupati Kebumen atau	Wawancara

	pembangunan shrimp estate serta tinjauan peraturan terkait kolaborasi program tersebut		pihak yang terkait	
3.	Analisis terkait konsep ekologis dalam perencanaan pembangunan shrimp estate serta perencanaan mengenai analisis kerusakan lingkungan sebagai dampak pembangunan	Primer	Ditjen Perikanan Budidaya-KKP RI atau pihak yang terkait	Wawancara
4.	Analisis dampak alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak hutan modern	Primer	Kepala dan penyuluh KCD Kehutanan Wilayah VIII Kebumen	Wawancara
5.	Peran KLH dan WALHI dalam memberikan suara dan dukungan pencegahan kerusakan lingkungan terkait program shrimp estate ini	Primer	Kepala KLH Kebumen serta Kepala atau jajaran WALHI Jawa Tengah	Wawancara
6.	Masyarakat yang terdampak pembangunan <i>shrimp estate</i>	Primer	Tokoh Masyarakat di Desa Tegalretno dan warga yang terkena dampak pembangunan shrimp estate	Wawancara
7.	Jumlah Masyarakat yang terdampak dari program pembangunan <i>shrimp estate</i>	Sekunder	Pemerintah Kabupaten Kebumen	Studi Dokumentasi
8.	Arsip pembagian rincian kegiatan	Sekunder	Penyuluh KCD Wilayah	Studi Dokumtasi

	penyuluhan kehutanan di Kecamatan Petanahan		VIII Kebumen yang menangani wilayah selatan	
10.	Arsip dokumen pembagian rincian program kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan untuk wilayah selatan		Penyuluh DLH KKP yang menangani wilayah selatan	Studi Dokumentasi
11.	Data dan kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait penanganan dampak pembangunan <i>shrimp estate</i> di Kabupaten Kebumen		Kepala KLH Kebumen	Studi Dokumentasi

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data guna kepentingan penelitian. Dengan kata lain, teknik pengumpulan data memerlukan langkah-langkah yang tepat, sistematis, dan strategis untuk memperoleh data yang valid dan akurat berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data dan teori yang terkandung dalam penelitian adalah *valid*, akurat dan *up-to-date*.

1) Wawancara

Di dalam penelitian ini, peneliti nantinya akan menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan datanya. Wawancara digambarkan sebagai percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua orang: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan (Moelong, 2018). Penelitian ini sendiri menggunakan

instrument *in-depth interview* yaitu proses wawancara dengan tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dengan narasumber terlibat. Berikut adalah data narasumber dan jadwal wawancara dalam penelitian ini.

Tabel 5. Jadwal Wawancara

No	Nama	Tanggal	Tempat
1.	Lilis Dwi Kartika Wati	Senin, 05 Desember 2022, pukul 11:17 WIB	Cabang Dinas Kehutanan
	Muryani, S.TP	Jumat, 11 November 2022, pukul 14:02 WIB	Wilayah VIII Kebumen
2.	Edi Rianto, S.T., M.T.	Rabu, 18 Januari 2023, pukul 10:55 WIB	BAPPEDA Kabupaten Kebumen
3.	Asep Nurdiana	Selasa, 07 Februari 2023, pukul 13:52 WIB	Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
	Drs. La Ode Haslan		
	Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M. Sc	Sabtu, 06 Januari 2024, pukul 10.30 WIB	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (<i>zoom meeting</i>)
4.	Agus Herunoto	Senin 13 Februari 2023, pukul 15:12 WIB	Forum Peduli Lingkungan Kabupaten Kebumen.
5.	Akhmad Harun, S.H	Sabtu, 12 November 2022, pukul 10:30 WIB	SETDA Kabupaten Kebumen
6.	Edy Purwoko	Sabtu, 12 November 2023, pukul 13:30 WIB	Pemerintah Kecamatan Petanahan
7.	Suwardi	Minggu, 08 Januari 2023, pukul 10:54 WIB	Paguyuban Nelayan Desa Tegalretno
8.	Solehudin	Minggu, 08 Januari 2023, pukul 11:40 WIB	Badan Permusyawaratan Desa Tegalretno.
9.	Muhrodi, Muzaki, AK, SA	Minggu, 08 Januari 2023, pukul 12:43 WIB	Desa Tegalretno, Petanahan, Kebumen.
10.	Nur Cholis	Sabtu, 06 Januari 2024, pukul 13:40 WIB	WALHI (<i>zoom meeting</i>)
11.	HR	Minggu, 08 Januari 2023, pukul 13:30 WIB	Desa Karanggadung, Petanahan, Kebumen
12.	Marsum	Minggu, 08 Januari 2023, pukul 15:00 WIB	Desa Tanggulangin, Klirong, Kebumen

2) Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati suatu fenomena. Kegiatan tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang fenomena yang sedang dipelajari. Informasi yang diperoleh harus objektif, jujur, dan dapat dipahami. Patton (1990) dalam Haryono (2020) juga menegaskan jika observasi merupakan metode penelitian yang berguna untuk memahami dan menambah pengetahuan tentang fenomena yang diteliti.

3) Dokumentasi

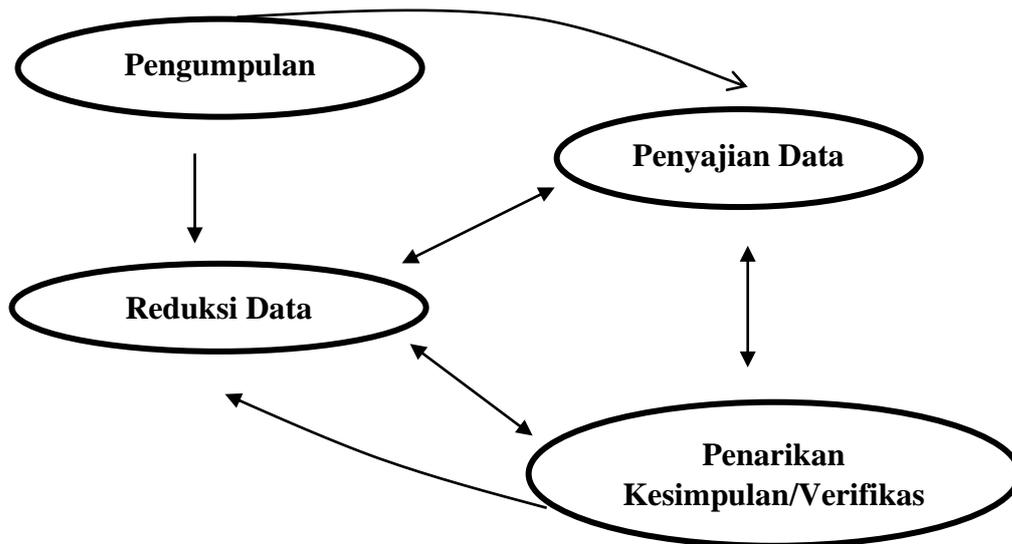
Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah ada sebelumnya. Catatan ini dapat berupa rangkaian dokumen, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen tertulis misalnya (buku harian, kisah hidup, biografi, pernyataan kebijakan, dll). Dokumentasi juga bisa berupa gambar seperti foto tambak udang modern dan data masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Dokumentasi melengkapi metode observasi dan wawancara.

1.8.6 Teknik Analisa Data

Langkah terpenting dalam proses penelitian adalah analisis data. Langkah analisis data merupakan langkah yang sangat diperlukan dalam proses penelitian. Ini adalah proses pengolahan dan penyajian data dalam menanggapi pertanyaan penelitian dan eksplorasi menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan model

Miles dan Huberman yang dimulai dari proses pemilihan data, penyajian data, hingga kesimpulan data. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut.

Gambar 1. Analisa Model Interaktif Miles dan Huberman



Sumber: Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994)

1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dapat dilakukan secara bersamaan saat sedang melakukan analisis data. Data tersebut adalah segala sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dan dipahami. Data atau informasi yang diperoleh bukanlah data atau informasi spesifik yang dapat dianalisis secara langsung untuk menarik kesimpulan yang jelas.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap yang dilakukan atau berlangsung secara terus-menerus selama penelitian ini berlangsung. Tujuannya supaya bisa

lebih merucutkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, serta dapat membuang data-data yang tidak diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi terorganisir yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dengan meneliti data tersebut, peneliti dapat menjadikannya lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan. Data yang ditampilkan dapat berupa grafik, rangkuman, bagan, grafik atau tabel.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data sudah selesai direduksi serta disajikan, peneliti dapat membuat kesimpulan dengan didukung bukti yang kuat pada tahap sebelumnya yaitu pengumpulan data. Kesimpulan ini sendiri merupakan jawaban dari rumusan masalah serta pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan oleh peneliti sebelumnya.